Turnitin Official

124-131_plagiasi

4. 논문 및 과제 검사 - 검사 후 Turnitin DB 미 저장 (Originality Check - No Repository)

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:134744613

Submission Date

Apr 10, 2026, 10:41 AM GMT+7

Download Date

Apr 10, 2026, 10:46 AM GMT+7

File Name

124-131_plagiasi.docx

File Size

5.9 MB

8 Pages

3,136 Words

22,499 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

8% Internet sources
7% Publications
9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

8% Internet sources
7% Publications
9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) on 2026-02-05	2%
2	Internet	ejournal.unibba.ac.id	1%
3	Publication	Anita Theresia Dwitasari, Wieky Rusmanto. "Implementation of the Minimum Ser...	<1%
4	Publication	Erni Wibowo, Episiasi, Donni Pestalozi. "Strategi Kepemimpinan Instruksional Ke...	<1%
5	Internet	ejournal.fisip.unjani.ac.id	<1%
6	Student papers	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara on 2025-12-10	<1%
7	Internet	docplayer.info	<1%
8	Publication	Rendi Surya Pamungkas, Kiswanto Kiswanto. "Pelestarian dan Pengembangan Al...	<1%
9	Internet	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id	<1%
10	Internet	www.repository.trisakti.ac.id	<1%
11	Student papers	Program Studi Psikologi on 2025-08-17	<1%

12 Internet

e-journal.stkipsiliwangi.ac.id <1%

13 Internet

jeal.ppj.unp.ac.id <1%

14 Student papers

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) on 2026-02-05 <1%

15 Internet

repository.bakrie.ac.id <1%

16 Internet

www.itjen.kemenkeu.go.id <1%

17 Publication

Lenora Beay, Dortje Leonora Yokbeth Lopulalan, Vransisca Kissya. "Tata Kelola Ko... <1%

18 Publication

Rahayuningsih, Esti. "Strategi Komunikasi Organisasi Untuk Meningkatkan Citra ... <1%

19 Publication

Maila D.H. Rahiem. "Towards Resilient Societies: The Synergy of Religion, Educati... <1%

20 Student papers

Universitas Negeri Semarang on 2019-08-07 <1%

Inovasi Strategi Pemerintah dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah: Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nurfadilla Nasir[1)], Abdul Jabbar[2)], Sandi Lubis[3)]

Abstrak

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi strategi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani ATS serta menilai dampak awal kebijakan daerah terhadap upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta didukung oleh telaah dokumen kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan dukungan pengodean tematik berbasis *NVivo*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan ATS ditopang inovasi tata kelola kolaboratif, integrasi lintas sektor, serta pendekatan *policy co-creation* yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang adaptif berkontribusi pada perbaikan sistem pendataan, penguatan pendidikan nonformal, dan peningkatan partisipasi anak dalam layanan pendidikan. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi berbasis tata kelola kolaboratif dalam menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pendidikan lokal.

Kata Kunci: Anak Tidak Sekolah; Inovasi Strategi Pemerintah Daerah; Tata Kelola Kolaboratif; *Policy Co-Creation*; Kebijakan Pendidikan Daerah.

Abstract

The issue of out-of-school children (ATS) remains a serious challenge in regional education development, particularly in areas with complex social and geographical characteristics. This study aims to analyze the innovative strategies of the Sidenreng Rappang District Government in addressing ATS and to assess the initial impact of regional policies on mitigation efforts. The study employs a qualitative approach with an exploratory case study design. Data were collected through in-depth interviews with officials from the Education Office, the Community and Village Empowerment Office, and managers of Community Learning Centers (PKBM), and supported by policy document review. Data analysis followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana supported by NVivo-based thematic coding. The findings indicate that the ATS management strategy is supported by collaborative governance innovation, cross-sector integration, and a policy co-creation approach involving village governments and communities. Adaptive policy implementation contributes to improved data systems, strengthened non-formal education, and increased children's participation in education services. The study confirms the importance of collaborative governance-based innovation in bridging the gap between policy design and local educational realities.

Keywords: *Out-of-school children; Local government innovation strategies; Collaborative governance; Policy co-creation; Local education policy.*

PENDAHULUAN

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi masalah penting dalam proses pembangunan pendidikan di Indonesia, karena mencerminkan ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan pendidikan di berbagai wilayah (Kawuryan, 2021). Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak, tetapi juga berdampak pada sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan di daerah (Ogochukwu et al., 2022; Pavlova et al., 2021). Keadaan sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan lokal memengaruhi keberhasilan kebijakan lokal, meskipun berbagai kebijakan nasional telah diterapkan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis untuk membuat dan menerapkan kebijakan pendidikan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks otonomi daerah.

Problem ini juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang masih memiliki jumlah anak tidak sekolah yang tinggi. Menurut data dari Dinas Pendidikan, jumlah anak ATS mencapai 7.389 pada tahun 2024, tetapi turun menjadi 7.060 pada tahun 2025. Meskipun angka tersebut menurun, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa akses ke pendidikan masih tidak merata. Faktor sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis, dan rendahnya kesadaran pendidikan di beberapa masyarakat pedesaan adalah semua faktor yang mempengaruhi kondisi ini (Permatasari, 2023; Sandra et al., 2020). Selain itu, penanganan ATS di tingkat daerah seringkali berfokus pada pendekatan administratif seperti pendataan dan penyediaan bantuan, sehingga belum sepenuhnya menyentuh akar masalah (Bahri, 2021).

Faktor penyebab ATS seperti kemiskinan dan pendidikan rendah orang tua biasanya menjadi perhatian penelitian sebelumnya (Shanty et al., 2024). Namun, penelitian tentang bagaimana pemerintah daerah membuat strategi penanganan ATS yang inovatif masih sedikit, khususnya yang menggabungkan kolaborasi multipihak, tata kelola, dan inovasi kebijakan (Akbar et al., 2025; Brawijaya, 2023). Penurunan ini menunjukkan bahwa penelitian yang lebih mendalam tentang peran pemerintah daerah dalam pembuatan strategi kebijakan kontekstual diperlukan.

Memperhitungkan situasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan dalam pendekatan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menangani Anak Tidak Sekolah dan menilai dampak awal kebijakan daerah terhadap upaya penanggulangannya (Hidayat, 2024; Nuh et al., 2025). Penelitian terbaru ini berfokus pada perubahan dalam tata kelola kebijakan pendidikan daerah yang dibuat melalui kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan nonformal, dan masyarakat. Tidak ada tujuan dari penelitian ini untuk mengukur keberhasilan kebijakan secara kuantitatif. Sebaliknya, tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana strategi kebijakan mempengaruhi akses pendidikan di tingkat lokal pada tahap awal perumusannya, pelaksanaannya, dan pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami dinamika strategi pemerintah daerah dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), diperlukan kerangka teoretis yang mampu menjelaskan hubungan antara pembaruan kebijakan, keterlibatan aktor kebijakan, serta proses pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan tiga perspektif utama dalam studi kebijakan publik, yaitu:

1. Inovasi Kebijakan dan Inovasi Tata Kelola

Inovasi kebijakan merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan yang menghadapi permasalahan kompleks dan dinamis. Konsep *Governance Innovation* menekankan pentingnya pembaruan dalam tata kelola pemerintahan melalui mekanisme kolaboratif, fleksibel, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (Torfing et al., 2021). Dalam perspektif ini, inovasi tidak hanya dipahami sebagai pembentukan program baru, tetapi juga mencakup perubahan cara berpikir, metode kerja, serta pola interaksi antaraktor pemerintahan dan masyarakat (Temitope, 2023). Sebagai pendekatan pembaruan kebijakan dan pelayanan publik, inovasi tata kelola memungkinkan pemerintah daerah merancang solusi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lokal, termasuk dalam menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam situasi seperti ini, inovasi tata kelola sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menangani masalah Anak Tidak Sekolah dan membantu memperluas akses ke pendidikan.

2. Penciptaan Kebijakan Bersama

Pendekatan penciptaan kebijakan bersama *(policy co-creation)* menempatkan masyarakat dan lembaga lokal sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik (Roiseland, 2024). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi pendidikan, dan lembaga lokal memungkinkan

lahirnya kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan nyata di lapangan serta memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat (Such et al., 2022). Dalam konteks kebijakan pendidikan inklusif, *co-creation* menjadi pendekatan yang relevan karena permasalahan seperti Anak Tidak Sekolah tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme *top-down* (Abdalla et al., 2024). Keterlibatan aktif aktor lokal membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta mendorong tanggung jawab bersama dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. Dalam hal ini, untuk menentukan apakah pendekatan yang digunakan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan berkontribusi terhadap pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang, penting bagi aktor lokal untuk terlibat dalam proses pembuatan undang-undang bersama.

3.Implementasi Kebijakan

Keberhasilan kebijakan publik di tingkat daerah sangat ditentukan oleh efektivitas implementasinya di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan masyarakat (Guzali, 2025; Maisarah, 2025). Implementasi kebijakan tidak hanya merupakan tahap teknis pelaksanaan, tetapi juga proses adaptasi kebijakan terhadap kondisi sosial dan dinamika lokal (Prasetyo et al., 2024). Hubungan antara desain kebijakan dan dampaknya di lapangan menjadi krusial, karena kebijakan yang dirancang tanpa mempertimbangkan konteks lokal cenderung mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan diperlukan untuk memahami sejauh mana kebijakan pendidikan daerah mampu memberikan dampak nyata terhadap penanganan Anak Tidak Sekolah (Ishak, 2023). Dalam hal ini, keberhasilan inovasi strategi di Sidenreng Rappang untuk menurunkan angka ATS secara signifikan sangat bergantung pada efektivitas implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2026 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus eksploratif untuk memahami dinamika inovasi strategi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam fenomena kebijakan dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini melibatkan enam informan, termasuk pejabat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yang berfungsi sebagai penyedia program pendidikan nonformal di tingkat lokal. Informan dipilih karena memiliki peran strategis dalam proses pendataan, perumusan program, serta pelaksanaan intervensi kebijakan penanganan ATS.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai inovasi strategi pemerintah daerah dalam penanganan ATS. Untuk keperluan analisis data, wawancara dilakukan dari 6 Januari hingga 13 Januari 2026, dan semuanya direkam dan ditranskripsikan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif oleh Miles et al (2019) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara siklik dan berkelanjutan. Proses analisis dimulai dengan melakukan transkripsi hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan proses *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data penelitian. Untuk membantu proses analisis data, perangkat lunak NVivo versi 15 digunakan. Perangkat lunak ini membantu proses pengodean data dan pengelompokan tema secara sistematis.

4

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, hasil observasi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Prosedur ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan merefleksikan kondisi empiris di lapangan secara akurat (Creswell & Poth, 2018). Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan keterkaitan antara inovasi strategi pemerintah daerah, proses implementasi kebijakan, dan dampaknya terhadap penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Pengodean NVivo

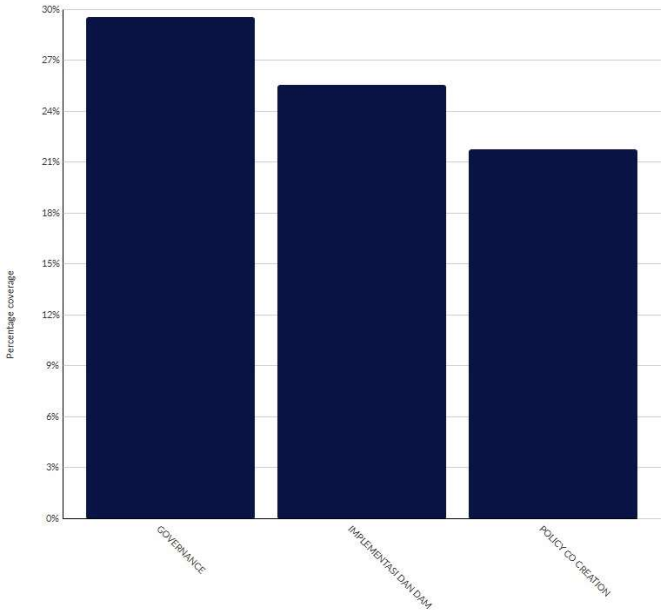

Gambar 1. Hasil Pengodean Nvivo
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari tiga tema utama: pemerintahan, pelaksanaan dan dampak kebijakan, dan pembuatan kebijakan bersama. Di antara ketiga tema tersebut, pemerintahan adalah yang paling menonjol dalam cerita informan. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen ATS di tingkat daerah tidak hanya berfokus pada tugas administratif. Sebaliknya, lebih menekankan pada peningkatan tata kelola melalui kerja sama lintas sektor. Temuan dari dominasi tema *governance* menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan aktor dan sumber daya menjadi faktor utama dalam merespons masalah ATS. Dalam konteks inovasi tata kelola, temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah bertumpu pada penguatan mekanisme koordinasi sebagai dasar dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pendidikan.

Dimensi Governance dalam Penanganan ATS

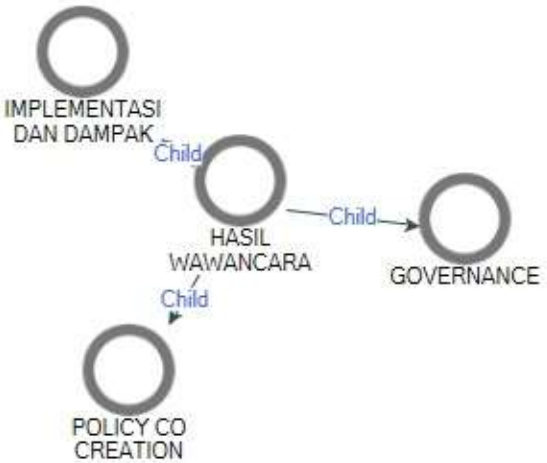

Gambar 2. Hasil Pemetaan Relasi Antartema
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai penghubung utama antara implementasi dan perumusan kebijakan di lapangan. Dinas teknis, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan nonformal berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif adalah mekanisme penting untuk meningkatkan ketepatan pendataan dan efektivitas intervensi kebijakan. Pendekatan berbasis lokal dapat menghasilkan informasi yang lebih kontekstual, seperti yang ditunjukkan oleh peran aparatur desa dalam menemukan anak-anak yang tidak sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa, dari perspektif inovasi tata kelola, keberhasilan strategi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan antaraktor untuk berkolaborasi dalam sistem kebijakan pendidikan.

Policy co-creation sebagai Strategi Inovatif

Gambar 3. Analisis *Word Cloud*
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat dan keluarga memainkan peran penting dalam menangani ATS. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa istilah yang berkaitan dengan partisipasi sosial mendominasi data wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat, aparat desa, dan pengelola PKBM telah terlibat secara aktif dalam proses menemukan dan menangani anak tidak sekolah. Pelibatan ini meningkatkan relevansi kebijakan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan keberlanjutan program. Dalam perspektif *co-creation*, partisipasi aktor lokal sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dibuat berdasarkan kondisi sosial masyarakat secara langsung daripada dari atas ke bawah.

Implementasi Kebijakan dan Dampaknya di Lapangan

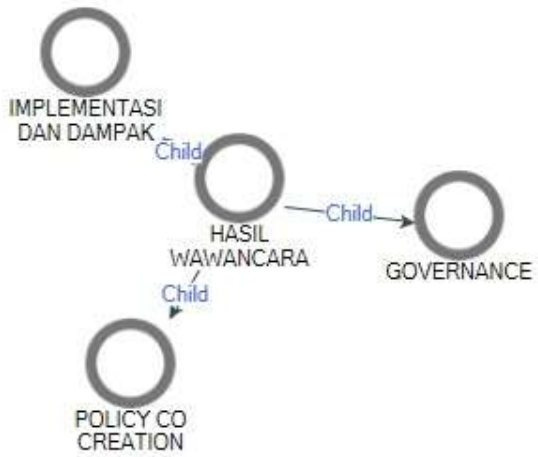

Gambar 4. Tema Implementasi dan Dampak
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai intervensi, seperti pendataan berbasis desa, peningkatan PKBM, dan bantuan pendidikan bagi keluarga rentan, memungkinkan pelaksanaan kebijakan penanganan ATS. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah telah diterjemahkan ke dalam inisiatif lokal yang nyata, bukan hanya pada tahap perumusan kebijakan.

Peran aparatur desa dalam mendampingi keluarga ATS secara langsung sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Pendampingan ini memungkinkan identifikasi hambatan pendidikan secara lebih spesifik, yang memungkinkan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran. Dampak awal dari penerapan kebijakan terlihat pada perbaikan sistem pendataan ATS di tingkat desa dan kelurahan serta peningkatan partisipasi anak dalam pendidikan nonformal. Dalam hal implementasi kebijakan, hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial masyarakat. Kemampuan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan adalah faktor yang sangat penting untuk keberhasilan strategi ini.

Analisis Integratif: Menghubungkan Inovasi Tata Kelola dengan Realitas Empiris ATS

Penelitian menunjukkan bahwa penanganan ATS di Kabupaten Sidenreng Rappang tergantung pada kolaborasi tata kelola, pelibatan masyarakat, dan implementasi kebijakan lokal. Data menunjukkan bahwa jumlah anak ATS turun dari 7.389 pada tahun 2024 menjadi 7.060 pada tahun 2025. Meskipun jumlah ATS masih tinggi, penurunan ini menunjukkan dampak awal dari strategi yang digunakan.

Seperti yang ditunjukkan oleh integrasi antara temuan kualitatif dan data empiris tersebut, peningkatan keakuratan pendataan dan efektivitas intervensi kebijakan didorong oleh peningkatan tata kelola kolaboratif. Melalui pendekatan partisipatif, pelibatan masyarakat membantu pemerintah memahami faktor sosial yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Hasil menunjukkan bahwa perubahan dalam pendekatan pemerintah daerah untuk menangani ATS tidak hanya bergantung pada kebijakan resmi, tetapi juga pada kemampuan untuk membuat mekanisme kerja sama yang sesuai dengan situasi lokal.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Lanjutan

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran mengenai inovasi strategi pemerintah daerah dalam penanganan ATS, keterbatasan penelitian masih terdapat pada cakupan informan yang berfokus pada aktor kelembagaan. Perspektif keluarga dan anak sebagai penerima manfaat kebijakan belum tergali secara mendalam.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dari kelompok keluarga dan anak yang mengalami kondisi tidak bersekolah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan pendidikan daerah dari sudut pandang pengguna layanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan pendekatan tata kelola baru yang menekankan kerja sama lintas sektor dan peran aktif pemerintah desa dalam penanganan dan pendampingan anak tidak sekolah (ATS). Dengan menggunakan pendekatan ini, pemerintah daerah dapat secara sistematis mengintegrasikan berbagai pihak dan sumber daya. Akibatnya, proses identifikasi masalah dan perumusan intervensi kebijakan menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi lokal.

Dari sisi dampak, rencana tersebut menunjukkan hasil awal. Pada tahun 2025, jumlah siswa ATS akan turun dari 7.389 pada tahun 2024 menjadi 7.060 pada tahun 2025. Selain itu, akan ada peningkatan partisipasi siswa di sekolah non-formal dan perbaikan sistem pendataan di desa dan kelurahan. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatkan pelaksanaan kebijakan lokal membantu meningkatkan akses ke pendidikan dan menangani Anak Tidak Sekolah secara lebih efektif.

Saran

Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu meningkatkan arah kebijakan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui peningkatan tata kelola kolaboratif yang terintegrasi lintas sektor. Tujuan dari peningkatan tata kelola ini adalah untuk meningkatkan kemampuan koordinasi antar perangkat daerah, mengoptimalkan fungsi pemerintah desa, dan membangun sistem pendataan yang komprehensif sebagai dasar untuk perumusan kebijakan yang lebih fleksibel. Untuk memperluas akses ke pendidikan, pendidikan nonformal juga harus dipertimbangkan sebagai komponen strategis. Ini terutama berlaku untuk anak-anak yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan formal.

Untuk lebih maju, pemerintah daerah harus mengubah kebijakan penanganan ATS menjadi pendekatan yang berbasis bukti dan berkelanjutan, termasuk penggunaan data yang lebih akurat dan evaluasi kebijakan secara berkala. Untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang efek kebijakan, penelitian selanjutnya harus menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

REFERENSI

Abdalla, M. E., Taha, M. H., Onchonga, D., Nour, N., Kelly, D., Harney, S., & Mcgrath, D. (2024). Exploring strategies , programs , and influencing factors for integrating social accountability into undergraduate medical education : a scoping review. *BMC Medical Education*, *24*(1), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-024-06072-z.

Akbar, M. C., Pasa, I. T., & Asfa, D. A. (2025). STRATEGI INOVASI LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN BISNIS DI POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN PADA ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, *09*(02), 348–359. https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i2.6875

Bahri, S. (2021). Dropped Out of School Prevention Through the Smart Indonesia Program. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *532*(4), 470–474.

Brawijaya, U. (2023). Local government collaborative innovation policy. *VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATIO*, *22*(3), 332–343.

https://doi.org/https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.22.3.33347

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.

Guzali, M. (2025). Implementation of Regional Regulation No . 5 of 2015 on The Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Sorong Regency. *Journal of Scientific Research*, *2*(1), 19–27. https://doi.org/https://doi.org/10.70716/seed.v2i1.231.

Hidayat. (2024). International Journal Administration, Business & Organization. *International Journal Administration, Business & Organization*, *5*(3), 85–92. https://doi.org/https://doi.org/10.61242/ijabo.24.439

Ishak, D. (2023). Implementation of Education Quality Assurance Policy : Between. *JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA*, *02*(01), 83–91. https://doi.org/https://doi.org/10.58471/ju-pendi.v2i01.386.

Kawuryan, S. P. (2021). International Journal of Instruction. *International Journal of Instruction*, *14*(2), 811–830. https://doi.org/https://doi.org/10.29333/iji.2021.14245a.

Maisarah. (2025). Exploring the Key Factors in the Implementation of the GERMAS Policy : A Public Management Perspective Using the Mazmanian and Sabatier Framework. *Journal of Educational Management Research*, *04*(04), 1870–1879. https://doi.org/https://doi.org/10.61987/jemr.v4i4.1144.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.

Nuh, M., Pratama, M. R., & Pratama, M. R. (2025). STRATEGIC MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENT : A. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, *09*(01), 56–82. https://doi.org/https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i1.6391

Ogochukwu, A., Chinecherem, M., & Ngozi, E. (2022). Impact of Educational Sector on Human Capital Development in Nigeria. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, *22*(21), 42–52. https://doi.org/10.9734/AJEBA/2022/v22i2130686

Pavlova, O., Ivanova, I., Chirkova, N., & Buslayeva, Y. (2021). Additional education of children as an innovative resource for the development of regional educational potential. *SHS Web of Conferences 98*, *03015*(98), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.1051/shsconf/20219803015

Permatasari, H. R. (2023). Dropout Cause of Elementary School Children in West Java , Indonesia : A Descriptive Study from The Academic-Economic Perspective , and Its Relation to The Pandemic. *International Journal of Recent Educational Research*, *4*(5), 665–677. https://doi.org/https://doi.org/10.46245/ijorer.v4i5.389

Prasetyo, H., Sumartono, Suryadi, & Nuh, M. (2024). Implementing Port Operation Policy through Collaborative Governance Perspective. *Journal of Ecohumanism*, *3*(8), 5876–5885. https://doi.org/https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5197.

Roiseland. (2024). For all seasons ? Exploring the policy-context for co-creation. *Public Money & Management ISSN:*, *44*(6), 491–499. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2206046.

Sandra, H., Majid, M. S. A., Dawood, T. C., & Hamid, A. (2020). What Causes Children to Work in Indonesia ? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(11), 585–593. https://doi.org/https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.585.

Shanty, M. V., Mahadtir, M., Awaluddin, Natalia, D., Ramadani, R. A., & Aswi, A. (2024). Statistical Modeling and Factors Influencing School Dropout in Indonesia: A Review. *Sainsmat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*,

13(1), 68–80. https://doi.org/https://doi.org/10.35580/sainsmat131608032024.

Such, E., Smith, K., Woods, H. B., & Meier, P. (2022). Governance of Intersectoral Collaborations for Population Health and to Reduce Health Inequalities in High-Income Countries : A Complexity-Informed Systematic Review. *International Journal of Health Policy and Management*, *11*(12), 2780–2792. https://doi.org/https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.6550

Temitope, T. (2023). Investigating Innovative Models of Governance and Collaboration for Effective Public Administration in a Multi-Stakeholder Landscape. *International Journal Papier*, *4*(2), 18–28. https://doi.org/https://doi.org/10.47667/ijppr.v4i2.209.

Torfing, J., Ferlie, E., Jukic, T., & Ongaro, E. (2021). A theoretical framework for studying the co-creation of innovative solutions and public value. *Policy & Politics*, *49*(2), 189–209. https://doi.org/https://doi.org/10.1332/030557321x16108172803520.